ANALISIS BEBAN PAJAK PADA PERUSAHAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

**Stevanus Gatot Supriyadi., SE., M.Ak**

**(Dosen FEB Universitas Kahuripan Kediri)**

**Toek Hartantijo., SE., M.Ak., AK., CA., BKP**

**(Konsultan pajak)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh revaluasi aset terhadap laba sebelum pajak, pengaruh beban pajak terhadap laba sebelum pajak, pengaruh revaluasi aset terhadap beban pajak, dan mediasi laba (rugi) sebelum pajak terhadap hubungan antara revaluasi aset dengan beban pajak. Dengan teknik *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 31 perusahaan.

Metode analisis yang digunakan adalah PLS, yang menunjukkan hasil laba sebelum pajak dipengaruhi oleh revaluasi aset, beban pajak tidak dipengaruhi oleh laba sebelum pajak, revaluasi aset yang tidak mempengaruhi beban pajak, dan laba (rugi) sebelum pajak tidak mampu memediasi hubungan antara revaluasi aset dengan beban pajak.

Kata Kunci: Beban Pajak, Revaluasi Aset, Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Alalysis of Tax Burden from Industry which Resgistered in Indonesian Stock Exchange

Abstract

This research have purpose to analuze influence of revaluation profit of asset before tax, influence tax burden from profit before tax, and meditation profit (loss) before tax of intercourse between revaluation asset with tax burden. Whith purposive sampling technic there are 31 sample of industry.

The method of analysis is PLS this method show result of profit before tax influence by revoluation asset, tax burden do not to influenced profit before tax, revaluation asset do not to influence tax burden, and profit (loss) before tax cannot memediasi intercourse between revaluation asset with tax burden.

1

1. PENDAHULUAN
   1. Latar Belakang Penelitian

Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap. Revaluasi sering dimaknai penilaian ulang yang menyebabkan nilai aset menjadi lebih tinggi, disisi lain revaluasi dapat juga menghasilkan nilai yang lebih rendah dari aset tercatat (Martani, 2012). Alasan yang mendasari keputusan revaluasi aset oleh perusahaan adalah untuk memastikan bahwa nilai wajar dari aset tetap perusahaan tercermin dalam laporan keuangan, dan regulasi pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak untuk menetapkan peraturan tentang penilaian kembali (Revaluasi) aset tetap atau aktiva tetap apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan nilai.

Revaluasi aset mengacu pada penyajian kembali atas nilai buku aset (carrying amount) sehingga mendekati nilainya sekarang (Brown et al, 1992). Revaluasi aset mempengaruhi laporan keuangan dalam dua cara. Pertama, mengubah jumlah aset yang ditampilkan di laporan posisi keuangan dan angka dalam ekuitas. Kedua, revaluasi mengubah keuntungan saat ini dan masa yang akan datang yang disebabkan oleh perubahan depresiasi dari aset yang direvaluasi (Lin dan Peasnell, 2000a) Menurut Tay (2009), Revaluasi aset tetap dapat berupa upward revaluation dan downward revaluation. Upward revaluation adalah penyajian kembali nilai buku aset sejauh hal tersebut tidak melebihi net current value atau recoverable value. upward revaluation mengacu pada incremental value dari nilai buku aset, sedangkan downward revaluation berarti bahwa net current value dibawah nilai bukunya. Upward revaluation aset tetap meningkatkan nilai ekuitas pemegang saham dan nilai aset tetap. Upward revaluation juga dapat menurunkan rasio financial-leverage seperti Rasio Debt Equity (Tay, 2009).

Pemerintah telah lama mendukung Revaluasi Aset melalui peraturan menteri keuangan nomor (PMK) 79/PMK.03/2008 pada tanggal 23 Mei 2008 dengan tarif 10% final dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atau surplus revaluasi. Dan Di Tahun 2015 Pemerintah menerbitkan PMK 191/010/2015 dan disempurnakan dengan PMK 233/PMK.03/2015 untuk tujuan insentif pajak yang berbatas waktu dan tarif, antara lain :

1. 3% untuk pengajuan penilaian kembali aktiva periode 15 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2015
2. 4% untuk pengajuan penilaian kembali aktiva periode 1 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2016
3. 6% untuk pengajuan penilaian kembali aktiva periode 1 Juli 2016 s.d. 31 Desember 2016

Apabila penilaian kembali aktiva tetap hanya untuk tujuan perpajakan, maka perusahaan akan melakukan penilaian kembali aktiva tetap terkait dengan pajak sehingga nilai tambah dengan adanya penilaian kembali aktiva tetap tersebut hanya terkait dengan perpajakan saja. Penilaian kembali aktiva tetap tidak hanya untuk tujuan perpajakan saja, tetapi juga untuk melihat rasio-rasio keuangan, semisal rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas dan rasio pasar, maka akan menambah daya tarik bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap.

Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. PSAK No. 25 menyebutkan bahwa Informasi tentang kinerja suatu perusahaan terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa depan. Informasi tersebut juga sering kali digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan aset yang disamakan dengan kas di masa depan. Informasi tentang kemungkinan perubahan kinerja juga penting dalam hal ini (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).Laba rugi sebelum pajak dalam laporan laba rugi merupakan laba bersih yang belum dikurangi dengan beban pajak, laba sebelum pajak memberikan informasi mengenai gambaran kinerja perusahaan tanpa memperhatikan pengaruh pajak, dapat dikatakan perusahaan memiliki kinerja yang baik apabila perusahaan mampu menghasilkan laba sebelum pajak yang tinggi.

Laba sebelum pajak adalah laba bersih yang belum dikurangi dengan beban / biaya pajak. Bahasa Inggris laba sebelum pajak adalah Earning Before Taxes ( EBT ). Laba sebelum pajak memberikan informasi analisis investasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja operasi perusahaan tanpa memperhatikan pengaruh pajak. Dengan menghapus factor pajak, tentunya EBT akan lebih berfokus kepada analisis profitabilitas operasi sebagai ukuran tunggal kinerja perusahaan. Analisis semacam ini sangat penting untuk membandingkan perusahaan sejenis di satu industry. Definisi laba sebelum pajak adalah pengukuran laba operasi dan laba non operasi perusahaan sebelum mempertimbangkan besarnya jumlah biaya pajak yang harus dibayarkan.

Laba sebelum pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dimana dalam PSAK no. 46 dijelaskan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba (rugi) perusahaan pada suatu periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016), dengan demikian ketika perusahaan melakukan revaluasi aset, diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga bisa meningkatkan laba sebelum pajak, yang akhirnya pendapatan pajak yang diterima oleh negara akan bertambah.

Penelitian tentang revaluasi aset tetap telah benyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, tetapi tidak banyak yang mengkaitkannya dengan laba bersih sebelum pajak penghasilan, dan pendapatan pajak yang diterima oleh negara yang diperoleh dari beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk meneliti pengaruh kebijakan Direktorat Jendral Pajak atas Revaluasi aset terhadap Laba sebelum pajak dan Beban pajak yang terdiri PPh Kini dan Pajak Tangguhan. Mengingat Realisasi Pajak Penghasilan selalu kurang dari target yang ditetapkan (Tabel 1.1) dan Untuk mengetahui efek dari pengambilan kebijakan Revaluasi bagi perusahaan.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | TARGET | REALISASI | PERSENTASE TARGET TERHADAP REALISASI |
| 2012 | 519.965 | 465.070 | 89,44% |
| 2013 | 584.890 | 506.443 | 86,59% |
| 2014 | 586.306 | 546.181 | 93,16% |
| 2015 | 644.396 | 602.308 | 93,47% |

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

1. TELAAH PUSTAKA

**2.1. Revaluasi Aset Tetap**

Revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.  
 Tujuan penilaian kembali aset tetap perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Dan Manfaatnya :

(1) Neraca menunjukan posisi kekayaan yang wajar.  
(2) Kenaikan niali aset tetap, mempunyai konsekuensi naiknya beban penyusutan aset tetap yang dibebankan ke dalam laba rugi, atau dibebankan ke harga pokok produksi.

Kendala yang dihadapi untuk melakukan revaluasi ini :  
Kegiatan revaluasi ini tergolong kegiatan yang tidak mudah untuk dilaksanakan dan memerlukan biaya yang besar untuk membayar jasa penilai. Aset tetap perusahaan yang dapat dinilai kembali adalah aset tetap berwujud yang terletak atau yang berada di Indonesia yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan ojek pajak. Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa atau ahli penilai yang diakui/ memperoleh izin pemerintah.

Salah satu perbedaan pokok antara PSAK No. 16 (2016) tersebut dibandingkan dengan PSAK No. 16 (1994) adalah dalam hal pengukuran setelah pengakuan awal. Pada PSAK No.16 (2016) disebutkan bahwa suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi suatu entitas dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Apabila entitas menggunakan model biaya maka setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Model biaya ini sama perlakuannya dengan standar akuntansi yang sudah ada sebelumnya.

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi:

1. Harga perolehannya termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan sebelum dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain;
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intense manajemen;
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

**2.2. Kebijakan Pajak Tentang Revaluasi Aset**

Kebijakan revaluasi asset di bidang perpajakan telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 79 Tahun 2008, dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dilaksanakan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan peraturan tersebut, dan atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap:

* + 1. Seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
    2. Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

**2.3. Laba Sebelum Pajak**

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba merupakan indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan keuangan, tepatnya laba rugi. Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005: 25) mendefenisikan laba sebagai berikut:

Laba (earnings) atau laba bersih (net income) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat.

Laba terdiri dari empat elemen utama yaitu pendapatan (revenue), beban (expense), keuntungan (gain), dan kerugian (loss). Defenisi dari elemen-elemen laba tersebut telah dikemukakan oleh Financial Accounting Standard Board dalam Stice, Stice, dan Skousen (2004: 230) (1) Pendapatan (revenue), (2) Beban (expense), (3) Keuntungan (gain), (4) Kerugian (loss).

**2.2.3. Beban Pajak**

Pada PSAK 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan beberapa definisi yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

* 1. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.
  2. Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
  3. Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.
  4. Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak pada satu periode.
  5. Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
  6. Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan

b) sisa kompensasi kerugian.

7) Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa:

a) perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (taxable amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled); atau

b) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (deductible amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled)

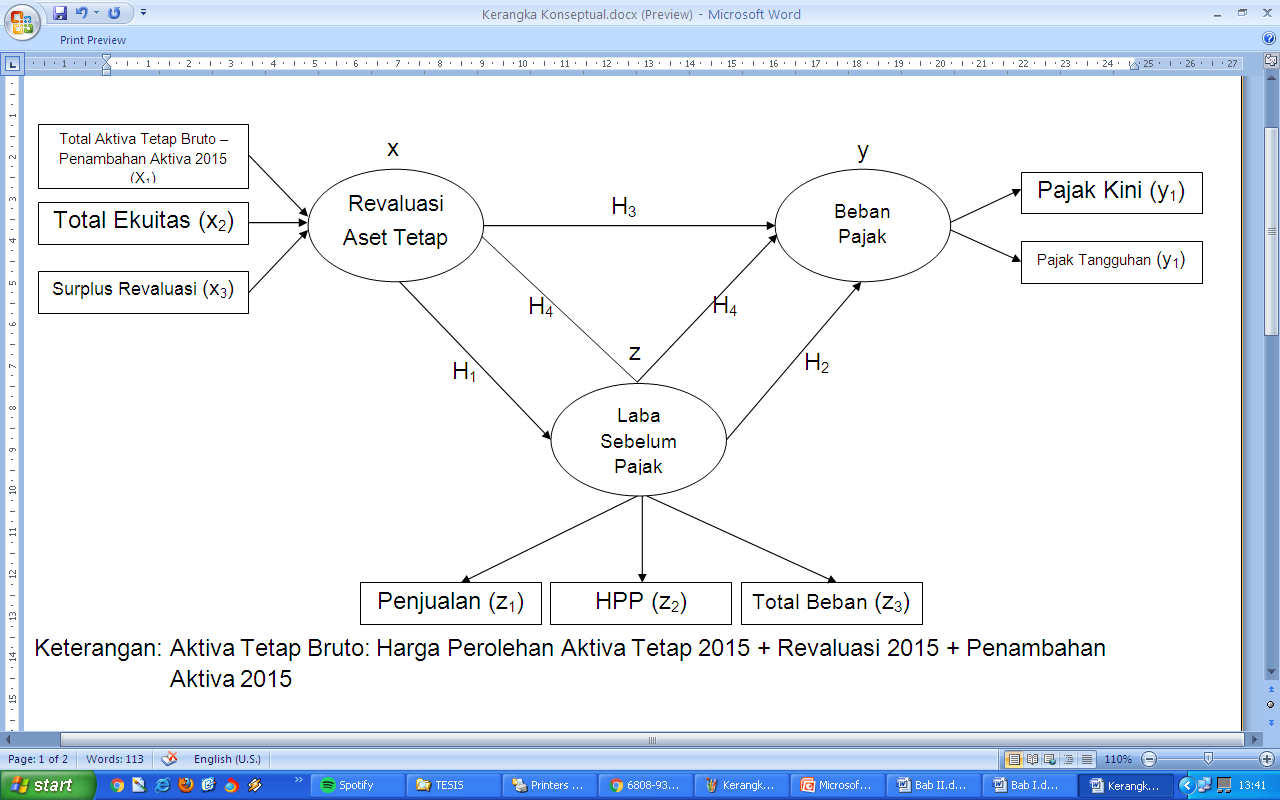
8) Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa:

a) Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (taxable amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled); atau

b) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (deductible amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

**2.3. Kerangka Konseptual**

Adapun kerangka penelitian pada penelitin ini dapat ditunjukkan dengan bagan alur pemikiran sebagai berikut ini.

****

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

**2.4. Hipotesis**

Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Revaluasi Aset Tetap berpengaruh secara langsung terhadap Laba Sebelum pajak.

H2: Laba sebelum pajak berpengaruh secara langsung terhadap Beban Pajak .

H3: Revaluasi Aset Tetap berpengaruh secara langsung terhadap Beban Pajak.

H4: Revaluasi Aset Tetap berpengaruh secara langsung terhadap Beban Pajak melalui laba sebelum pajak.

1. **METODE PENELITIAN**

**3.1. Perspektif Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian berlandaskan filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011:8).

Ruang Lingkup Penelitian

**3.2.** **Definisi Operasional Variabel**

Berikut dijelaskan definisi operasional masing-masing variabel dan indikator yang digunakan pada penelitian ini:

1. Revaluasi aset tetap (X): merupakan penilaian kembali aset tetap menjadi lebih tinggi atau lebih rendah (Martani dkk, 2012), ada tiga indikator yang digunakan untuk menentukan revaluasi aset tetap antara lain:
2. wAktiva tetap netto (2)Total ekuitas (3)Surplus revaluasi
3. Laba rugi sebelum pajak (Y):Laba bersih yang diperoleh perusahaan sebelum dikurangi dengan beban pajak, indikator yang digunakan antara lain:

(1)Penjualan (Y1):, (2) Harga pokok penjualan, (3)Total beban

1. Beban pajak (Z): adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba (rugi) perusahaan pada suatu periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Indikator yang digunakan antara lain:
2. Pajak kini, (2) Pajak tangguhan.
   1. **Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**
      1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang dapat dihitung, dandiperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang telah dipublikasikan dan berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti, adapun data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015.

* 1. **Populasi dan Sampel**
     1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 dan telah dipublikasi oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu sebanyak 543 perusahaan.

* + 1. Sampel

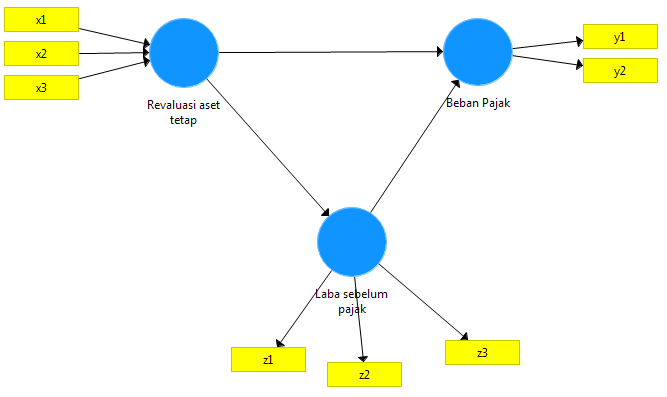
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu (Sugiyono, 2007). Kriteria yang ditetapkan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Laporan Keuangan Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015dan telah dipublikasikan.
2. Melakukan revaluasi aset tetap pada tahun 2015.
3. Tercatat tidak mengalami rugi sebelum pajak pada laporan keuangan tahun 2015 yang telah diterbitkan.
4. Memiliki beban pajak yang harus dibayar pada tahun 2015 yang tercatat pada laporan laba rugi.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas dari 543 perusahaan, terdapat 38 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan, kemudian sebanyak 454 perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap, sehingga diperoleh 51 perusahaan yang melakukan revaluiasi, dari 51 perusahaan yang melakukan revaluasi terdapat 20 perusahaan yang mengalami rugi sebelum pajak, sehingga sampel penelitian yang diperoleh sebanyak 31 perusahaan.

* 1. **Teknik Analisis**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan software Smart PLS (Partial Least Square). Dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder dan data berupa skala rasio maka model struktural yang digunakan adalah model struktural (*Inner Model).* Model struktural dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Struktural (*Inner Model)*

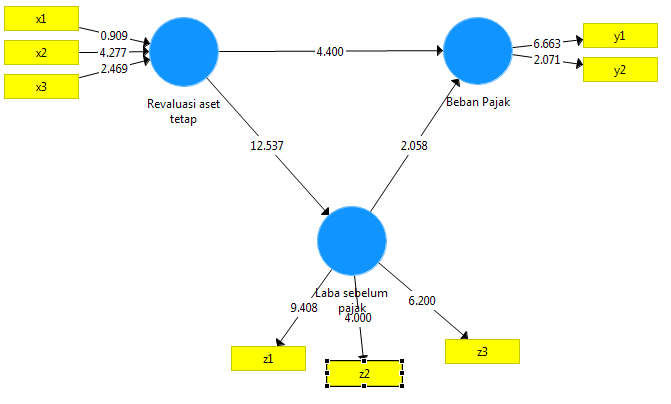
Model struktural dalam PLS di evaluasi dengan menggunakan R2 untuk konstruk dependen, nilai koefisisen *path* atau *t-values* tiap *path* untuk uji signifikansi antar konstruk dalam model struktural. Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen, semakin tinggi R2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan (Hartono dan Abdillah, 2009 : 62). Semakin tinggi nilai R2berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

Nilai koefisien path atau inner model menunjukkan tingkat signifikan dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien path atau inner model yang ditunjukkan oleh nilai T-statistic, harus di atas 1,96.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian-Pengujian Hipotesis (*Inner Model*)**

Inner model dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.1. Inner Model

Pada model struktural PLS menggunakan *inner model* dapat diketahui nilai R2. Nilai R2 untuk mengukur tingkat variansi perubahan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Berikut hasil uji yang telah dilakukan.

**Tabel 4.5.**

**Hasil Uji R Square**

|  |  |
| --- | --- |
|  | R Square |
| Revaluasi aset tetap |  |
| Laba Sebelum Pajak | 0,708 |
| Beban Pajak | 0,922 |

Sumber: data sekunder, diolah

Berdasarkan nilai R Square di atas dapat dijelaskan bahwa laba sebelum pajak sebesar 0,708, artinya revaluasi aset tetap dapat menjelaskan nilai laba sebelum pajak sebesar 70,8%. Nilai R Square beban pajak sebesar 0,922 menunjukkan bahwa revaluasi aset tetap dapat menjelaskan beban pajak sebesar 92,2%.

Selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis melalui proses *bootstraping* menggunakan parameter uji t-statistik untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas dengan hasil sebagai berikut.

**Tabel 4.6.**

**Hasil Uji *Bootstrapping***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Original*  *Sample* | *Sample Mean* | Standar Deviasi | t-statistics | P Values |
| Revaluasi aset tetap Laba Sebelum Pajak | 0,841 | 0,879 | 0,067 | 12,537 | 0,000 |
| Laba Sebelum Pajak  Beban Pajak | -0,646 | -0,498 | 0,314 | 2,058 | 0,040 |
| Revaluasi aset tetap Beban Pajak | 1,438 | 1,339 | 0,327 | 4,400 | 0,000 |

Sumber: data sekunder, diolah

Ukuran signifikan dalam mendukung hipotesis digunakan perbandingan nilai t-tabel dan t-statistics, hasil pengujian t-statistics lebih besar daripada t-tabel hipotesis dapat terdukung untuk tingkat keyakinan 95% persen maka t-tabel untuk hipotesis dua ekor (*two tailed*) adalah > 1,96. Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa:

1. Hipotesis pertama Revaluasi Aset Tetap berpengaruh secara langsung terhadap Laba Sebelum pajak dapat diterima karena nilai t-statistik yang didapatkan sebesar 12,537 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,96 dengan tingkat signifikan 0,000.
2. Hipotesis kedua Laba sebelum pajak berpengaruh secara langsung terhadap Beban Pajak diterima karena nilai t-statistik yang didapatkan sebesar 2,058 yang lebih besar dari 1,96 dengan tingkat signifikan 0,040 yang lebih kecil dari 0,05.
3. Hipotesis ketiga Revaluasi aset tetap berpengaruh secara langsung terhadap Beban Pajak diterima karena nilai t-statistik yang didapatkan sebesar 4,400 yang lebih besar dari 1,96 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.
4. Untuk pembuktian hipotesis keempat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7.**

**Hasil Uji *Bootstrapping* (Mediasi)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Original*  *Sample* | *Sample Mean* | Standar Deviasi | t-statistics | P Values |
| Revaluasi aset tetap Laba Sebelum Pajak | 0,841 | 0,879 | 0,067 | 12,537 | 0,000 |
| Laba Sebelum Pajak  Beban Pajak | -0,646 | -0,498 | 0,314 | 2,058 | 0,040 |
| Revaluasi aset tetap Beban Pajak | 0,895 | 0,909 | 0,130 | 6,901 | 0,000 |

Sumber: data sekunder, diolah

Berdasarkan tabel *total effect* jika nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 berarti variabel mediasi mampu memediasi secara penuh. Hasil uji di atas menunjukkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini terbukti karena nilai t-statistik variabel mediasi (laba sebelum pajak) yang didapatkan lebih besar dari 1,96.

**4.4. Pembahasan**

**4.4.1. Pengaruh Revaluasi Aset terhadap Laba Sebelum pajak**

Berdasarkan uji yang dilakukan didapatkan hasil bahwa hipotesis pertama revaluasi aset tetap berpengaruh secara langsung terhadap Laba Sebelum pajak dapat diterima karena nilai t-statistik yang didapatkan sebesar 12,537 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,96 dengan tingkat signifikan 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap perubahan nilai pada revaluasi aset tetap akan berpengaruh terhadap laba sebelum pajak.

Terdukungnya hipotesis pertama ini menunjukkan bahwa dilakukannya revaluasi aset tetap pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 akan mempengaruhi laba sebelum pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Katuuk (2013) menunjukkan hasil bahwa revaluasi aktiva tetap secara umum akan menghasilkan kenaikan nilai pasar wajar yang merupakan nilai nilai aktiva pada tahun berjalan dan biaya diamortisasi aktiva. Kenaikan biaya amortisasi akan menurunkan laba usaha.

**4.4.2. Pengaruh Laba Sebelum Pajak terhadap Beban Pajak**

Berdasarkan uji yang dilakukan didapatkan hasil bahwa Hipotesis kedua laba sebelum pajak berpengaruh secara langsung terhadap beban pajak diterima karena nilai t-statistik yang didapatkan sebesar 2,058 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,96 dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Diterimanya hipotesis kedua ini menunjukkan bahwa setiap perubahan nilai laba sebelum pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 akan mempengaruhi nilai beban pajak.

**4.4.3. Pengaruh Revaluasi Aset Tetap terhadap Beban Pajak**

Berdasarkan uji yang dilakukan didapatkan hasil bahwa Hipotesis ketiga yaitu pengaruh revaluasi aset tetap terhadap beban pajak diterima karena nilai t-statistik yang didapatkan sebesar 4,400 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,96 dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Diterimanya hipotesis ketiga ini menunjukkan bahwa dilakukannya revaluasi aset tetap pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 mempengaruhi beban pajak.

Kebijakan revaluasi asset di bidang perpajakan telah ditetapkan oleh PMK No. 79 Tahun 2008 dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dilaksanakan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan peraturan tersebut, dan atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Sesuai dengan hasil penelitian maka setiap perubahan pada revaluasi aset tetap akan menentukan perubahan pada beban pajak.

Sementara pada penelitian Dewi (2014) menunjukkan hasil bahwa jika secara fiskal perusahaan mengalami kerugian, maka sebaiknya perusahaan melakukan revaluasi atas aset tetapnya karena dalam pembayaran pajak perusahaan akan lebih diuntungkan. Namun demikian, jika secara fiskal perusahaan mengalami laba, maka revaluasi atas aset tetapnya harus dilakukan saja, walaupun dalam pembayaran pajak perusahaan akan mengalami kerugian, akan tetapi pada tahun berikutnya setelah dilakukan revaluasi atas aset perusahaan maka perusahaan akan lebih menghemat pajak. Karena jika perusahaan melakukan revaluasi atas asset tetapnya setiap tahun atau tiga sampai lima tahun, maka perusahaan akan lebih menghemat pajaknya.

**4.4.4. Pengaruh Revaluasi asset tetap terhadap Beban Pajak melalui laba sebelum pajak**

Berdasarkan uji yang dilakukan didapatkan hasil bahwa Hipotesis keempat bahwa pengaruh revaluasi asset tetap terhadap beban pajak melalui laba sebelum pajak diterima karena nilai t-statistik yang didapatkan lebih besar dari t-tabel sebesar 1,96 dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Diterimanya hipotesis keempat ini menunjukkan bahwa variabel laba sebelum pajak menjadi variabel mediasi yang memperkuat pengaruh revaluasi aset tetap terhadap beban pajak. Penelitian Hikmah (2016) menunjukkan hasil bahwa revaluasi dilakukan terhadap sebagian kelompok jenis aktiva tertentu, tanah, bangunan dan mesin. Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dampak yang timbul pada laporan keuangan adalah meningkatnya saldo aset tetap, ekuitas, utang pajak dan timbul akun keuntungan revaluasi aset tetap serta menurunnya rasio utang terhadap ekuitas. Perbedaan metode penyusutan menimbulkan beda temporer dan koreksi fiskal negatif pada perhitungan beban pajak perusahaan. Selain itu, revaluasi menimbulkan biaya baru diantaranya biaya jasa penilaian dan utang Pajak Penghasilan Final.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya berkaitan dengan revaluasi aset tetap, beban pajak, dan laba sebelum pajak diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Revaluasi aset tetap berpengaruh secara langsung terhadap laba sebelum pajak secara signifikan. Oleh karena itu, kebijakan melakukan revaluasi aset tetap akan memberikan keterdukungan terhadap laba sebelum pajak.
2. Laba sebelum pajak berpengaruh signifikan terhadap beban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai terhadap laba sebelum pajak akan memberikan keterdukungan terhadap nilai beban pajak.
3. Revaluasi aset tetap berpengaruh signifikan terhadap beban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 akan memberikan keterdukungan terhadap beban pajak.
4. Revaluasi aset tetap berpengaruh signifikan terhadap beban pajak melalui laba sebelum pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 akan memberikan keterdukungan terhadap laba sebelum pajak sehingga berdampak pada beban pajak.
5. Kebijaksanaan Direktorat Jendral Pajak dalam menerbitkan peraturan tentang Revaluasi Aset Tetap, di satu sisi menguntungkan Wajib Pajak sehingga pajak yang dikenakan berkurang di sisi yang lain kualitas dan kuantitas Wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) meningkat sehingga Penerimaan Pendapatan Pajak Nasional dapat melebihi target yang diharapkan.

**5.2. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan yang dikemukakan maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan yang telah melakukan revaluasi aset tetap, penelitian ini merupakan evaluasi atas kinerja kebijaksanaan perusahaan.
2. Bagi perusahaan yang belum melakukan kebijakan revaluasi aset tetap, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mempertimbangkan kebijakan revaluasi aset untuk memberikan gambaran mengenai implikasi akibat kebijakan revaluasi aset tetap.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan lebih dari satu tahun pengamatan sehingga hasil yang diperoleh lebih mendekati kondisi yang sebenarnya.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sample perusahaan yang sejenis misalnya pada perusahaan manufaktur.

**DAFTAR PUSTAKA**

Brown, P., Izan, H. Y., dan Loh, A. L. (1992). Fixed Asset Revaluations and Managerial Incentive. *Abacus, 28*(1), 36-57.

Dewi, P. N. (2014). Implementasi Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79 Tahun 2008 pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*.

Hanafi, M. M., dan Halim, A. (2003). *Analisis Laporan Keuangan.* Analisis Laporan Keuangan: UPP AMP YKPN.

Hikmah, N. (2016). Implikasi Penerapan PMK 191/PMK.010/2015 Terhadap Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap.

Ikatan Akuntan Indonesia. (1994). *Standar Akuntansi Keuangan Revisi 1994.* Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2016.* Jakarta: Salemba Empat.

Jogiyanto, dan Abdillah, W. (2009). *Konsep dan Aplikasi PLS untuk Penelitian Empiris.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Kuang, T. M. (2011). Analisis Ketidakharmonisan antara PPSAK No. 13, 16, dan 19 dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK03/2008 mengenai Revaluasi Aset Tetap, Properti Investasi, dan Aset Tak Berwujud. *eJournal Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha*.

Kumala, F. (2015). Analisis Perbandingan Metode Pengukuran Aset Tetap Antara Model Biaya dan Model Revaluasi Pada PT. X.

Lin, Y. C., dan Peasnell, K. V. (2000a). Fixed Asset Revaluation and Equity Depletion in UK. *Journal of Business Finance and Accounting, 27*(3), 359-394.

Manihuruk, T. N., dan Farahmita, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Revaluasi Aset Tetap pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Saham Beberapa Negara ASEAN. *Universitas Indonesia*.

Mariyana, D., dan Syafitri, L. (2012). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak PT. Gembala Sriwijaya. *Jurnal Akuntansi STIE MDP*, 1-6.

Martani, D., Veronica, S., Wardhani, R., Farahmita, A., dan Tanujaya, E. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK.* Jakarta: Salemba Empat.

Munawir. (2002). *Analisis Laporan Keuangan* (4 ed.). Yogyakarta: Liberty.

Nadeak, E. (2011). Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Penghematan Pajak pada PT. Kabelindo Murni. *eJournal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma*.

Prastowo, D., dan Juliaty, R. (2002). *Analisis Laporan Keuangan.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan.* Jakarta: Menteri Keuangan.

Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan 2016.* Jakarta: Menteri Keuangan.

Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.* Jakarta: Menteri Keuangan.

Siswati, S. (2014). Revaluasi Aset Tetap Berdasar Aspek Akuntansi PSAK 16 (Revisi 2011) dan Aspek Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta*.